



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VIII**

Nomor : **263** /SB/K/KR.VIII/IV/2020 Banjarbaru, **04** April 2020
Sifat : Penting Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Lampiran : 1 (satu) berkas Di Wilayah Kerja
Perihal : Penyesuaian status PNS Kantor Regional VIII BKN
yang dipekerjakan/diperbantukan di –
Tempat

1. Berkenaan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Surat Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Nomor CI.26-30/V.54-7/99 tanggal 12 Maret 2020 perihal Penyesuaian Status PNS yang Dipekerjakan/Diperbantukan, maka perlu penyesuaian status PNS yang saat ini dipekerjakan/diperbantukan,
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat kiranya Bapak Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menginventarisir PNS yang saat ini berstatus dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 dimaksud *paling lambat tanggal 7 September 2020*;
3. Adapun penyelesaian penyesuaian status PNS yang saat ini dipekerjakan/diperbantukan sebagai berikut :
 - a. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat,

memindahkan, dan memberhentikan PNS, maka PNS sebagaimana dimaksud diwajibkan kembali ke Instansi Asal atau tetap melaksanakan tugas pada Instansi dimana PNS tersebut dipekerjakan/diperbantukan dengan cara mutasi secara difinitif;

b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada :

- 1) Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; (daftar terlampir)
- 2) Di luar Instansi Pemerintah, meliputi proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan lain yang ditentukan Pemerintah; (daftar terlampir)
- 3) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

Maka, PNS sebagaimana dimaksud dapat tetap melaksanakan tugas pada Instansi dimana PNS tersebut dipekerjakan/diperbantukan dengan cara penugasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020;

4. Apabila terdapat kendala dalam teknis penyelesaian penyesuaian status PNS yang saat ini dipekerjakan/diperbantukan, agar menghubungi Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya;
5. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
KANTOR REGIONAL VIII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



RAMDHANI, S.H
NIP. 196012311981031001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN;
3. Kepala BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM seluruh wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN;
4. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN;

**DAFTAR NAMA INSTANSI DAERAH
DI WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL VIII BKN**

- 1 **BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi Kalimantan Tengah**
- 2 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kapuas
- 3 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Barito Utara
- 4 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Barito Selatan
- 5 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
- 6 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
- 7 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Pulang Pisau
- 8 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Gunung Mas
- 9 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Lamandau
- 10 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Sukamara
- 11 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Murung Raya
- 12 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Katingan
- 13 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Seruyan
- 14 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Barito Timur
- 15 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Palangka Raya
- 16 **BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi Kalimantan Selatan**
- 17 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Banjar
- 18 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Tanah Laut
- 19 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Tapin
- 20 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
- 21 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
- 22 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Barito Kuala
- 23 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Tabalong
- 24 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kotabaru
- 25 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
- 26 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Tanah Bumbu
- 27 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Balangan
- 28 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Banjarmasin
- 29 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Banjarbaru
- 30 **BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi Kalimantan Timur**
- 31 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
- 32 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Paser

- 33 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Berau
- 34 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kutai Barat
- 35 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Kutai Timur
- 36 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
- 37 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
- 38 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Samarinda
- 39 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Balikpapan
- 40 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Bontang
- 41 **BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Provinsi Kalimantan Utara**
- 42 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Bulungan
- 43 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Malinau
- 44 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Nunukan
- 45 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kab. Tana Tidung
- 46 BKD/BKDD/BKPP/BKPSDM Pemerintah Kota Tarakan

**DAFTAR INVENTARISASI
LEMBAGA NON STRUKTURAL
YANG TIDAK MEMILIKI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

DAN

**DAFTAR
KEANGGOTAAN INDONESIA
PADA ORGANISASI INTERNASIONAL**

**DAFTAR INVENTARISASI LEMBAGA NON STRUKTURAL
YANG TIDAK MEMILIKI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN**

NO	NAMA INSTANSI	KETERANGAN
1	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2	SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3	SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM
4	SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN RI	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM
5	SEKRETARIAT KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
6	SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7	SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8	SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9	SEKRETARIAT KOMISI BANDING MEREK	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
10	SEKRETARIAT KOMISI BANDING PATEN	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
11	SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
12	SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
13	SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
14	SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KEAMANAN PENERBANGAN	PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
15	SEKRETARIAT LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL	PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
16	SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT	PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
17	SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL	PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
18	SEKRETARIAT DEWAN ENERGI NASIONAL	PADA KEMENTERIAN ESDM
19	SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	PADA KEMENTERIAN SETNEG
20	SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
21	SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
22	SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
23	SEKRETARIAT BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS	PADA ESDM
24	SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
25	SEKRETARIAT BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL	PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
26	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN SABANG	TIDAK ADA
27	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	TIDAK ADA
28	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN	TIDAK ADA
29	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN	TIDAK ADA
30	SEKRETARIAT KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL	PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
31	SEKRETARIAT KOMITE INDUSTRI NASIONAL	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
32	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI NASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
33	SEKRETARIAT KOMISI PENYULUHAN NASIONAL	PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

34	SEKRETARIAT LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN	PADA KEMENTERIAN LHK
35	SEKRETARIAT KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK	PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
36	SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
37	SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN	PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
38	SEKRETARIAT KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
39	SEKRETARIAT KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA	PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
40	SEKRETARIAT KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA	PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
41	SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
42	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (DEWAN NASIONAL)	MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
43	SEKRETARIAT KANTOR STAF PRESIDEN	PADA SEKRETARIAT NEGARA
44	SEKRETARIAT KOMITE EKONOMI DAN INDUSTRI NASIONAL	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
45	SEKRETARIAT BADAN RESTORASI GAMBUT	PADA KEMENTERIAN LHK
46	SEKRETARIAT BADAN OTORITA DANAU TOBA	PADA KEMENKO KEMARITIMAN
47	SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	PADA KEMENTERIAN PPN
48	SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	PADA KEMENTERIAN LHK
49	SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
50	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF	PADA KEMENKO PEREKONOMIAN
51	SEKRETARIAT OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA	PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
52	SEKRETARIAT KOMITE AKREDITASI NASIONAL	PADA BSN
53	SEKRETARIAT BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO FLORES	PADA KEMENKO KEMARITIMAN
54	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA	PADA PUPERA
55	SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PADA PUPERA
56	SEKRETARIAT DEWAN TIU NASIONAL	PADA KEMENKOMINFO
57	AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	TIDAK ADA
58	SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	TIDAK ADA
59	SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	TIDAK ADA
60	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PELAKSANA MASJID ISTIQLAL	TIDAK ADA
61	SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS	BELUM ADA, MASIH DALAM PROSES PEMBENTUKAN
62	TVRI	TIDAK ADA (LPP TIDAK DISEBUTKAN DI UU ASN)
63	RRI	TIDAK ADA (LPP TIDAK DISEBUTKAN DI UU ASN)

Daftar Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional

(Hasil Evaluasi Tahap II tahun 2018)

No	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Penjuru	Pewakilan Penjuru	Pendamping di Kemlu
1	AALCO	Asian African Legal Consultative Organization	New Delhi	Kemenkumham	KBRI New Delhi	Dit. HP Polkam
2	AASSREC	Association of Asian Social Science Research Council	Canberra	LIPI	KBRI Canberra	Dit. Sosbud OINB
3	ACC	ASEAN - China Centre	Beijing	Kemendag	KBRI Beijing	Dit. KXA
4	ACE	ASEAN Centre for Energy	Jakarta	KESDM	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
5	ACWC	ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children	Jakarta	KPPPA	PTRI ASEAN	Dit. KSBA
6	AFOCO	Asian Forest Cooperation Organization	Seoul	KLHK	KBRI Seoul	Dit. KSEA
7	AHA Centre	ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management	Jakarta	BNPB	PTRI ASEAN	Dit. KSBA
8	AHTF	ASEAN Animal Health Trust Fund	Jakarta	Kementan	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
9	AICHR	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights	Jakarta	Kemenlu	PTRI ASEAN	Dit. Polkam ASEAN
10	AIPA	ASEAN Inter-Parliamentary Organisation/Assembley	Jakarta	DPR	PTRI ASEAN	Dit. Polkam ASEAN
11	AIPR	ASEAN Institute for Peace and Reconciliation	Jakarta	Kemenlu	PTRI ASEAN	Dit. Polkam ASEAN
12	AJC	ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism/ ASEAN Japan Centre	Tokyo	Kemendag	KBRI Tokyo	Dit. KXA
13	AKC	ASEAN - Korea Centre	Seoul	Kemendag	KBRI Seoul	Dit. KXA
14	AMRO	ASEAN+3 Macroeconomic Research Office	Singapura	Kemenkeu	KBRI Singapura	Dit. PELH
15	AMTF	ASEAN Miltneral Trust Fund	Jakarta	KESDM	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
16	ANRPC	Association of Natural Rubber Producing Countries	Kuala Lumpur	Kemendag	KBRI Kuala Lumpur	Dit. PKKI
17	APCC	Asia Pacific Coconut Community	Jakarta	Kemendag	Tidak ada	Dit. PKKI
18	APCTT	Asia and the Pacific Centre for Transfer of Technology	New Delhi	LIPI	KBRI New Delhi	Dit. PELH
19	APEC	Asia Pacific Economic Co-operation	Singapura	Kemenlu	KBRI Singapura	Dit. KSIA Aspasaf
20	APGML	Asia Pacific Group on Money Laundering	Sydney	PPATK	KBRI Canberra	Dit. KIPS
21	APHCA	Animal Production and Health Commission	Bangkok	Kementan	KBRI Bangkok	Dit. PKKI
22	APLAC	Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation	Adelaide	BSN	KBRI Canberra	Dit. PKKI
23	APMP	Asia Pacific Metrology Programme	Ibaraki	LIPI	KBRI Tokyo	Dit. Sosbud OINB

No	Nama Pendak Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Pejuru	Pewakilan Pejuru	Pendamping di Kemlu
24	APO	Asian Productivity Organisation	Tokyo	Kemenaker	KBRI Tokyo	Dit. Sosbud OINB
25	APPPC	Asia and Pacific Plant Protection Commission	Bangkok	Kementan	KBRI Bangkok	Dit. PKKI
26	APPU	Asia Pacific Postal Union	Bangkok	Kemenkominfo	KBRI Bangkok	Dit. Sosbud OINB
27	APT	Asia Pacific Telecommunity	Bangkok	Kemenkominfo	KBRI Bangkok	Dit. Sosbud OINB
28	APTERR	ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve	Bangkok	Kementan	KBRI Bangkok	Dit. KXA
29	ASEAN	Association of the Southeast Asian Nations	Jakarta	Kementu	PTRI ASEAN	Ditjen KSA
30	ASEAN Foundation	ASEAN Foundation	Jakarta	Kementu	PTRI ASEAN	Dit. KSBA
31	ASEAN ICT	ASEAN Information, Communication and Technology Fund	Jakarta	Kemenkominfo	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
32	ASEAN NTO	ASEAN National Tourism Organization	Jakarta	Kemenpar	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
33	ASEANSAT	ASEAN Supreme Audit Institution	Jakarta	BPK	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
34	ASEANTA	ASEAN Tourism Association	Jakarta	BPK	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
35	ASEF	Asia - Europe Foundation	Putrajaya	Kemenpar	KBRI Kuala Lumpur	Dit. KSEA
36	ASF	ASEAN Science Fund	Singapura	Kementu	KBRI Singapura	Dit. KSIA Amerop
37	ASGP	Association of Secretary General of Parliaments	Jakarta	Kemenristek	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
38	ASOSAI	Asian Organisation of Supreme Audit Institutions	Jenewa	DPR	PTRI Jenewa	Dit. Sosbud OINB
39	ATAIC	Association of Tax Authorities of Islamic Countries	Seoul	BPK	KBRI Seoul	Dit. HP Sosbud
40	AYPF	ASEAN Youth Programme Fund	Khartoum	Kemenkeu	KBRI Khartoum	Dit. PELH
41	BIE	Bureau International des Expositions	Jakarta	Kemenpora	PTRI ASEAN	Dit. KSBA
42	BIMP FC	Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines - Facilitation Center	Paris	Kemendag	KBRI Paris	Dit. PKKI
43	BIPM	Bureau Internationale de Poids et Mesures	Jakarta	Kemenko Ekonomi	Tidak ada	Dit. KSIA Aspasaf
44	BWC	Biological and Toxin Weapons on their Destruction	Paris	BSN	KBRI Paris	Dit. PKKI
45	CA PGC	China - ASEAN Prosecutors General Conference	Jenewa	Kementu	PTRI Jenewa	Dit. KIPS
46	CCOP	Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia	Guangxi	Kejagung	KBRI Beijing	Dit. HP Polkam
47	CCSBT	Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna	Bangkok	KESDM	KBRI Bangkok	Dit. PELH
48	CDNL	Conference of Directors of National Libraries	Canberra	KKP	KBRI Canberra	Dit. PKKI
49	CDNLAO	Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania	Den Haag	Perpusnas	KBRI Den Haag	Dit. Sosbud OINB
			Tokyo	Perpusnas	KBRI Tokyo	Dit. Sosbud OINB

No	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Penjuru	Pewakilan Penjuru	Pendamping di Kemlu
50	CERF	Central Emergency Response Fund	New York	Amerika Serikat	PTRI New York	Dit. HAM & Ka.
51	CIFOR	Center for International Forestry Research	Bogor	Indonesia	Tidak ada	Dit. PELH
52	CIMMYT	International Maize and Wheat Improvement Center	Texcoco	Meksiko	KBRI Mexico City	Dit. PKKI
53	CIMT GT	Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle	Putrajaya	Malaysia	KBRI Kuala Lumpur	Dit. KSIA Aspasaf
54	CIRDAP	Centre on the Integrated Rural Development for Asia and the Pacific	Dhaka	Bangladesh	KBRI Dhaka	Dit. PELH
55	CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	Jenewa	Swiss	PTRI Jenewa	Dit. PELH
56	Colombo Plan	Colombo Plan	Colombo	Sri Lanka	KBRI Colombo	Dit. Sosbud OINB
57	CONSAL	Congress of South East Asian Librarians	Singapura	Singapura	KBRI Singapura	Dit. Sosbud OINB
58	COSPAR	Committee on Space Research	Paris	Prancis	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
59	COSPAS SARSAT	International Satellite System for Search and Rescue	Montreal	Kanada	KBRI Ottawa	Dit. Sosbud OINB
60	CPDAP	Colombo Plan Drug Advisory Programme	Colombo	Sri Lanka	KBRI Colombo	Dit. Sosbud OINB
61	CPOPC	Council of Palm Oil Producing Countries	Jakarta	Indonesia	Tidak ada	Dit. PKKI
62	CSAM	Regional Network for Agricultural Machinery	Beijing	Indonesia	KBRI Beijing	Dit. PELH
63	CTBTO	Preparatory Committee for the Comprehensive Test Ban Treaty Organization	Wina	RRT	KBRI/PTRI Wina	Dit. KIPS
64	CTI CFF	Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities	Manado	Austria	Tidak ada	Dit. KSIA Aspasaf
65	D8	Developing 8	Istanbul	Indonesia	Tidak ada	Dit. KSIA Aspasaf
66	EAPVP	East Asia Plant Variety Protection Forum	Tokyo	Turki	KBRI Ankara	Dit. Sosbud OINB
67	Egmont Group	Egmont Group	Toronto	Jepang	KBRI Tokyo	Dit. PKKI
68	ERIA	Economic Research Institute for ASEAN and East Asia	Jakarta	Kanada	KBRI Ottawa	Dit. KIPS
69	EROPA	Eastern Regional Organisation for Public Administration	Manila	Indonesia	PTRI ASEAN	Dit. KSEA
70	ETSI	European Telecommunications Standard Institute	Sophia Antipolis	Filipina	KBRI Manila	Dit. Sosbud OINB
71	FAO	Food and Agriculture Organisation	Roma	Prancis	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
72	G77	Economic Cooperation among the Developing Countries	New York	Italia	KBRI Roma	Dit. PKKI
73	IA/CA	International Association of Anti Corruption Authorities	Beijing	Amerika Serikat	PTRI New York	Dit. Sosbud OINB
74	IAEA	International Atomic Energy Agency	Wina	RRT	KBRI Beijing	Dit. HP Polkam
75	IAF Accreditation	International Accreditation Forum	Quebec	Austria	KBRI/PTRI Wina	Dit. KIPS
				Kanada	KBRI Ottawa	Dit. PKKI

Nb	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Panjuru	Pewakilan Panjuru	Pentamping di Kemlu
76	IAF Astronautical	International Astronautical Federation	Paris	LAPAN	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
77	IALA	International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities	Paris	Kemhub	KBRI Paris	Dit. HP Kewilayahan
78	IAP	International Association of Prosecutor	Den Haag	Kejagung	KBRI Den Haag	Dit. HP Polkam
79	IAU	International Astronomical Union	Paris	ITB	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
80	ICA Archive	International Council on Archives	Paris	ANRI	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
81	ICA Cartographic	International Cartographic Association	Budapest	BIG	KBRI Budapest	Dit. HP Kewilayahan
82	ICAO	International Civil Aviation Organisation	Montreal	Kemhub	KBRI Ottawa	Dit. Sosbud OINB
83	ICCO	International Cocoa Organization	Abidjan	Kementan	KBRI Dakar	Dit. PKKI
84	ICDT	Islamic Centre for Development of Trade	Casablanca	Pantai Gading	KBRI Rabat	Dit. Sosbud OINB
85	ICID	International Commission on Irrigation and Drainage	New Delhi	Maroko	KBRI New Delhi	Dit. Sosbud OINB
86	ICIMM	International Committee of the Military Medicine	Brussels	India	KBRI Brussels	Dit. KIPS
87	ICO	International Coffee Organization	London	Belgia	KBRI London	Dit. PKKI
88	ICOLD	International Commission on Large Dams	Paris	Inggris	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
89	ICOMP	International Committee on Management on Population Program	Kuala Lumpur	KemenPUPera	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
90	ICSU	International Council for Scientific Union	Paris	BKKBN	KBRI Kuala Lumpur	Dit. PELH
91	IEC	International Electro-technical Commission	Jenewa	LIPI	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
92	IECEE	IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment & Components	Jenewa	BSN	PTRI Jenewa	Dit. PKKI
93	IFAR	International Forum of Independent Audit Regulators	Jenewa	BSN	PTRI Jenewa	Dit. PKKI
94	IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions	Tokyo	Kemenkeu	KBRI Riyadh	Dit. PELH
95	IFRC	International Federation of Red Cross	Den Haag	Perpustnas	KBRI Tokyo	Dit. PELH
96	IHO	International Hydrographic Organisation	Jenewa	PMI	KBRI Den Haag	Dit. Sosbud OINB
97	IIAS	International Institute of Administrative Services	Monaco	TNI	PTRI Jenewa	Dit. Sosbud OINB
98	IIASA	International Institute for Applied Systems Analysis	Brussels	LAN	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
99	IFA	International Islamic Fiqh Academy	Laxenburg	Kemenristek	KBRI Brussels	Dit. Sosbud OINB
100	ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation	Jeddah	Kemenag	KBRI/PTRI Wina	Dit. Sosbud OINB
101	ILO	International Labour Organisation	Sydney	BSN	KBRI Riyadh	Dit. Sosbud OINB
			Jenewa	Kemenaker	KBRI Canberra	Dit. PKKI

No	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Perjuru	Penvakilan Perjuru	Pendamping di Kemlu
102	IMO	International Maritime Organization	London	Inggris	Kemenhub	PTRI Jenewa Dit. Sosbud OINB
103	IMSO	International Mobile Satellite Organization	London	Inggris	Kemenkominfo	Dit. Sosbud OINB
104	INBAR	International Network of Bamboo and Rattan	Beijing	RRT	KLHK	Dit. HP Kewilayahan
105	INSARAG	International Search and Rescue Advisory Group	Jenewa	Swiss	BASARNAS	Dit. PKKI
106	Interpol	International Criminal Police Organisation - Interpol	Lyon	Prancis	Poli	Dit. Sosbud OINB
107	INTOSAI	International Organisation of Supreme Audit Institutions	Wina	Austria	BPK	Dit. KIPS
108	IORA	Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation	Ebene Cyber City	Mauritius	Kemenlu	Dit. HP Sosbud
109	IOTC	Indian Ocean Tuna Commission	Victoria	Seychelles	KKP	Dit. KSIA Aspasaf
110	IPC	International Pepper Community	Jakarta	Indonesia	Kemendag	Dit. PKKI
111	IPPC	International Plant Protection Convention	Roma	Italia	Kementan	Dit. PKKI
112	IPU	Inter-Parliamentary Union	Jenewa	Swiss	DPR	Dit. Sosbud OINB
113	IRCICA	Research Centre for Islamic History, Art and Culture	Istanbul	Turki	Kemendikbud	Dit. Sosbud OINB
114	IRENA	International Renewable Energy Agency	Abu Dhabi	PEA	KESDM	Dit. PELH
115	IRMCT	International Residual Mechanism for Criminal Tribunals	Den Haag	Belanda	Kemenlu	Dit. HAM & Ka.
116	IRRI	International Rice Research Institute	Los Banos	Filipina	Kementan	Dit. PELH
117	ISA	International Seabed Authority	Kingston	Jamaika	Kemenlu	Dit. HP Kewilayahan
118	ISF	Islamic Solidarity Fund	Jeddah	Arab Saudi	Kemenag	Dit. Sosbud OINB
119	ISO Standardization	International Organisation for Standardization	Jenewa	Swiss	BSN	Dit. PKKI
120	ISO Sugar	International Sugar Organization	London	Inggris	Kementan	Dit. PKKI
121	ISTA	International Seed Testing Association membership fee	Bassersdorf	Swiss	Kementan	Dit. PKKI
122	ITLOS	International Tribunal for the Law of the Sea	Hamburg	Jerman	Kemenlu	Dit. HP Kewilayahan
123	ITPGRFA	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture	Roma	Italia	Kementan	Dit. PKKI
124	ITTO	International Tropical Timber Organisation	Yokohama	Jepang	KLHK	Dit. PKKI
125	ITU	International Telecommunication Union	Jenewa	Swiss	Kemenkominfo	Dit. Sosbud OINB
126	IUCN	International Union for Conservation of Nature	Gland	Swiss	KLHK	Dit. PELH
127	IUFRO	International Union of Forestry Research Organization	Wina	Austria	KLHK	Dit. PELH

No	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Penjuru	Perwakilan Penjuru	Pendamping di Kemlu
128	IUGG	International Union of Geodesy and Geophysics	Postdam			
129	IUT	Islamic University of Technology	Dhaka	BIG	KBRI Berlin	Dit. Sosbud OINB
130	Kyoto Protocol	Kyoto Protocol	Bonn			Dit. Sosbud OINB
131	MSG	Melanesian Spearhead Group	Port Vila	KLHK	KBRI Berlin	Dit. PELH
132	NACA	Network of Aquaculture Centers in Asia and the Pacific	Bangkok	Kemenu	KBRI Canberra	Dit. KSIA Aspasaf
133	NAM CSSTC	Non Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation	Jakarta	KKP	KBRI Bangkok	Dit. KSIA Aspasaf
134	NAM Seitech	Centre for Science and Tech of Non Aligned Movement	New Delhi	Kemenu	Tidak ada	Dit. Sosbud OINB
135	NPT	Review COP of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and its Preparation Committee	New York	Kementistek	KBRI New Delhi	Dit. Sosbud OINB
136	OANA	Organization of Asia and the Pacific News Agency	New York	Kemenu	PTRI New York	Dit. KIPS
137	OECD DC	Organization on Economic Cooperation and Development - Development Centre	Baku	ANTARA	KBRI Baku	Dit. Sosbud OINB
138	OGP	Open Government Partnership	Paris	Kemenu	KBRI Paris	Dit. PELH
139	OIC	Organisation of Islamic Conference	Washington	Kemenu	KBRI Washington	Dit. PELH
140	OIE	World Organisation for Animal Health	Jeddah	Kemenu	KBRI Riyadh	Dit. Sosbud OINB
141	OIML	Organisation International de Metrologie Legale	Paris	Kementan	KBRI Paris	Dit. PKKI
142	OPCW	Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons	Paris	Kemendag	KBRI Paris	Dit. PKKI
143	PAC	Pacific Accreditation Cooperation	Den Haag	Kemenu	KBRI Den Haag	Dit. KIPS
144	PATA	Pacific Asia Travel Association	Sydney	BSN	KBRI Canberra	Dit. PKKI
145	PIARC	World Road Association	Bangkok	Kemenpar	KBRI Bangkok	Dit. Sosbud OINB
146	PICS	Pharmaceutical Inspection Scheme	Paris	KemenPUPera	KBRI Paris	Dit. PELH
147	PPD	Partners in Population and Development	Jenewa	BPOM	PTRI Jenewa	Dit. Sosbud OINB
148	PUIC	Parliamentary Union of OIC Member Countries	Dhaka	BKKB	KBRI Dhaka	Dit. PELH
149	RAMSAR	Ramsar Convention on Wetlands	Tehran	DPR	KBRI Tehran	Dit. Sosbud OINB
150	SARBICA	Southeast Asia Regional Branch of ICA	Gland	KLHK	PTRI Jenewa	Dit. PELH
151	SCOSTEP	Science Committee on Solar Terrestrial Physics	Kuala Lumpur	ANRI	KBRI Kuala Lumpur	Dit. Sosbud OINB
152	SEAFDEC	Southeast Asian Fishery Development Centre	Toronto	LAPAN	KBRI Ottawa	Dit. Sosbud OINB
153	SEAMEO	South East Asian Ministers of Education Organization	Bangkok	KKP	KBRI Bangkok	Dit. PKKI
			Bangkok	Kemendikbud	KBRI Bangkok	Dit. KSIA Aspasaf

No	Nama Pendek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi Penjurut	Perwakilan Penjurut	Pendamping di Kemlu
154	SEAPAVAA	Southeast Asia Pacific Audio Visual Archive Association	Manila			
155	SESRIC	Statistic Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries	Ankara	ANRI	KBRI Manila	Dit. Sosbud OINB
156	South Centre	South Centre	Turki	BPS	KBRI Ankara	Dit. Sosbud OINB
157	Tokyo MOU	Tokyo MOU for Port State Control	Jenewa	Kemenlu	PTRI Jenewa	Dit. Sosbud OINB
158	UN	United Nations	Tokyo	Kemenhub	KBRI Tokyo	Dit. Sosbud OINB
159	UN WOMEN	UN Development Fund for Women	New York	Kemenlu	PTRI New York	Dijien KS Multilateral
160	UNCCD	UN Convention to Combat Desertification	New York	KPPPA	PTRI New York	Dit. HAM & Ka.
161	UNCITRAL	UN Commission on International Trade Law	Bonn	KLHK	KBRI Berlin	Dit. PELH
162	UNCTAD	UN Conference On Trade and Development	Wina	Kemenlu	KBRI/PTRI Wina	Dit. HP Ekonomi
163	UNCTAD DMFAS	UNCTAD Debt Management and Financial Analysis System	Jenewa	Kemenlu	PTRI Jenewa	Dit. PKKI
164	UNCTAD GTSP	UNSCATD Global System of Trade Preferences	Jenewa	Kemenkeu	PTRI Jenewa	Dit. PKKI
165	UNDP	UN Development Programme	Jenewa	Kemendeg	PTRI Jenewa	Dit. PKKI
166	UNEP 1030	Trust Fund for the Vienna Convention on the Protection of the Ozone Layer	New York	Kemenlu	PTRI New York	Dit. PELH
167	UNEP 1040	Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
168	UNEP 3060	Trust Fund for the Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and th	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
169	UNEP 5080	Trust Fund for the Convention on Biological Diversity	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
170	UNEP 700 NS	UNEP Fund 700 NS	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
171	UNEP 810	Regional Trust Fund for the Implementation of the Action Plan for the Protection and Development of the Marine	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
172	UNEP 9340	Trust Fund for the Core Programme Budget for the Biosafety Protocol	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
173	UNEP 9400	General Trust Fund for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, its Subsidiaries Bodies and	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
174	UNEP Lainnya	UNEP Fund Lainnya	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
175	UNESCO	UN Educational, Scientific and Cultural Organization	Nairobi	KLHK	KBRI Nairobi	Dit. PELH
176	UNFCCC	UN Framework Convention on Climate Change Trust Fund	Paris	Kemendikbud	KBRI Paris	Dit. Sosbud OINB
177	UNFPA	UN Population Fund Representative in Indonesia	Bonn	KLHK	KBRI Berlin	Dit. PELH
178	UNHABITAT	UN Human Settlement Programme/UN Centre for Human Settlements	New York	BKKBN	PTRI New York	Dit. Sosbud OINB
179	UNHCR	UN High Commissioner for Refugees	Nairobi	KemenPUPera	KBRI Nairobi	Dit. PELH
			Jenewa	Kemenlu	PTRI Jenewa	Dit. HAM & Ka.

No	Nama Pembek Organisasi	Nama Lengkap Organisasi	Lokasi Sekretariat	Instansi/Penjurum	Pewakilan Penjurum	Pendamping di Kemlu
180	UNICEF	UN Children's Fund	New York	Amerika Serikat	KPPPA	Dit. HAM & Ka.
181	UNIDIR	UN Institute for Disarmament Research	Jenewa	Swiss	Kemenlu	Dit. KIPS
182	UNIDO	UN Industrial Development Organisation	Wina	Austria	Kemenperin	Dit. PKKI
183	UNIBROIT	UN-International Institute for Unification of Private Law	Roma	Italia	Kemenkumham	Dit. HP Sosbud
184	UNITAR	UN Institute for Training and Research	New York	Amerika Serikat	Kemenlu	Dit. PELH
185	UNODC	UN Office on Drugs and Crime	Wina	Austria	Kemenlu	Dit. KIPS
186	UNRWA	UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East	Gaza City	Palestina	Kemenlu	Dit. HAM & Ka.
187	UNSIAP	UN Statistical Institute for Asia and the Pacific	Chiba	Jepang	BPS	Dit. PELH
188	UNWTO	UN World Tourism Organisation	Madrid	Spanyol	Kemenpar	Dit. Sosbud OINB
189	UPU	Universal Postal Union	Bern	Swiss	Kemenkominfo	Dit. Sosbud OINB
190	WADA	World Anti-Doping Agency	Montreal	Kanada	Kemenpora	Dit. Sosbud OINB
191	WAITRO	World Association of Industrial and Technological Research Organizations	Shah Alam	Malaysia	LIPI	Dit. Sosbud OINB
192	WCCJ	World Conference on Constitutional Justice	Strasbourg	Prancis	MK	Dit. HP Polkam
193	WCO	World Customs Organisation	Brussels	Belgia	Kemenkeu	Dit. PKKI
194	WCPCFC	Western and Central Pacific Fisheries Commission	Kolonia	Mikronesia	KKP	Dit. PKKI
195	WFP	World Food Programme	Roma	Italia	menterian PPN/Bappep	Dit. PKKI
196	WHO	World Health Organisation	Jenewa	Swiss	Kemenkes	Dit. Sosbud OINB
197	WIPO	World Intellectual Property Organisation	Jenewa	Swiss	Kemenkumham	Dit. PKKI
198	WMO	World Meteorological Organization	Jenewa	Swiss	BMKG	Dit. Sosbud OINB
199	WMO TC	WMO Typhoon Committee	Jenewa	Swiss	BMKG	Dit. Sosbud OINB
200	WTO	World Trade Organisation	Jenewa	Swiss	Kemendag	Dit. PKKI